



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 177/KPTS/T /2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
8. Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Ketahanan Pangan;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
24. Dinas Perkebunan;
25. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
26. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
27. Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan;
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
35. Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis;
36. Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau;
37. Kecamatan Bengkalis;
38. Kecamatan Bantan;
39. Kecamatan Bukit Batu;
40. Kecamatan Siak Kecil;
41. Kecamatan Rupat;
42. Kecamatan Rupat Utara;
43. Kecamatan Mandau;
44. Kecamatan Pinggir;
45. Kecamatan Bandar Laksamana;
46. Kecamatan Talang Muandau; dan
47. Kecamatan Bathin Solapan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 JANUARI 2022

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 177 / KPTS / I / 2022
 TANGGAL : 21 JANUARI 2022

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

1. SEKRETARIAT DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Peringkat Partisipatif I}}{\text{Total Skor yang Terisi}} \times \text{Nilai Peringkat}$	Semua Bagian Lingkup Setda Bengkalis
2	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai diperoleh dari kondisi variabel kematangan UKPBJ dan jumlah proses tender pengadaan barang dan jasa yang telah selesai dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kematangan UKPBJ diukur dari nilai variabel kematangan UKPBJ saat ini dibagi dengan 9 variabel UKPBJ. Jumlah proses tender diperoleh dari jumlah paket tender yg telah selesai di proses dibagi dengan jumlah dokumen tender yg di serahkan ke Bagian PBJ oleh masing2 OPD 	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Indeks Kelembagaan	Indeks Kelembagaan mencerminkan kelembagaan dari sisi struktur dan proses dalam mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kemampuan dalam beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.	Perhitungan melalui survei, dengan berdasarkan PermennPAN RB No 20 tahun 2018 tentang pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintahan	Bagian Organisasi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Persentase produk hukum daerah yang lulus uji harmonisasi	Produk hukum terdiri dari 3 jenis produk hukum yaitu: Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dan Pelaksanaannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi Produk Hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Bagian Hukum
5.	Nilai / Predikat SAKIP	Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, revaluasi dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]	Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Predikat LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Laporan yang wajib disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (capaian kebijakan, keuangan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan) serta pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Evaluasi atas laporan dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dengan melibatkan BPKP Pusat, BPKP Provinsi, Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota). Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dimaksudkan dalam rangka penilaian kinerja pemerintah atas hasil kerja keharan yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggungjawab kewenangan dalam waktu yang ditentukan. Baik capaian Indikator Kinerja Kunci, Standar Pelayanan Minimal, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah maupun Pelaksanaan tugas pembantuan.	Pelaksanaan pelaporan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Evaluasi dan penilaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan Tata

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prosentase produk kedewanan yang dihasilkan tepat waktu	Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan fungsi legislasi melaksanakan pembentukan peraturan daerah dalam 1 tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas dalam program penyusunan rancangan perda yang dipedomani bersama DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Ramperda yang ditindak lanjuti x 100% Jumlah Ramperda yang di targetkan
2	Presentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	Penyerapan masyarakat yang dianggapi dengan menyeleksi setiap aspirasi yang diterima dan diawasi oleh DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di pemerintahan daerah.	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah pengaduan masyarakat

3. INSPEKTORAT DAERAH

NO (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	DEFINISI OPERASIONAL (3)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN (4)	PENANGGUNG JAWAB UKURAN (5)
1	Opini BPK	Pernyataan Profesional sebagai kesimpulan dari Pemeriksaan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang didasarkan beberapa kriteria yaitu: Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Inspektoral Daerah
2	Persentase Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat	Suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/unit kerja yang atas rekomendasi yang dikeluarkan aparat pengawasan berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadakan oleh masyarakat	Rekomendasi Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti <u>Jumlah Pengaduan Masyarakat</u> x 100 %	Inspektoral Daerah
3	Level Maturitas SPIP	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh BPKP terhadap tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka Maturitas SPIP terpolo dalam 6 (enam) tingkatan yaitu: Belum ada, Rintisan, Berkembang, Terdefinisi, Terkelola dan Terukur, Optimum.	Hasil Quality Assurance Implementasi SPIP Pemerintah Kabupaten Bengkalis oleh BPKP	Inspektoral Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Jumlah Jumlah Perangkat Daerah Dilakukan Penilaian Mandiri Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Zona Integritas yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dicanangkan/diusulkan untuk dilakukan Penilaian Mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya diajukan ke Kementerian PAN RB untuk dilakukan evaluasi terhadap implementasi ZI menuju WiBK WBBM	Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilakukan Penilaian Mandiri Zona Integritas dan Diusulkan untuk dilakukan Evaluasi ZI menuju WBK / WBBM oleh Kementerian PAN RB	Inspektorat Daerah
5	Persentase Capaian MCP Korusupah Korupsi	Merupakan hasil penilaian atas capaian dari Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan upaya koordinasi dan suvervisi pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh KPK RI terhadap Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Hasil penilaian MCP Korusupah korupsi meliputi capaian dari Aksi pencegahan korupsi yang meliputi 8 (delapan) area intervensi antara lain : Perencanaan dan Penganggaran, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Kapabilitas APJP, Manajemen SDM, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, manajemen BMD dan Sektor Strategis	Hasil Penilaian MCP Korusupah Korupsi oleh KPK RI	Inspektorat Daerah
6	Level Kapabilitas APJP	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh BPKP terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tugas -tugas pengawasan yang terdiri dari 3 (tiga) yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang harus dimiliki APJP agar dapat mewujudkan peran APJP secara efektif	Hasil Quality Assurance Kapabilitas APJP Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis oleh BPKP	Inspektorat Daerah

4. DINAS PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dinas pendidikan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Umum dan Kepegawain)	Dinas Pendidikan
2	Program Pengelolaan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Kelulusan (Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun) 2. Angka Partisipasi Kasar PAUD (Pendidikan Anak usia Dini) 3. Angka Partisipasi kasar Sekolah menengah Pertama 4. Persentase pendidik bersertifikasi 5. Persentase Angka Putus sekolah 	<p>Jumlah Siswa Lulus Pada Jenjang Sekolah : Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang Sekolah pada Tahun Ajaran Sebelumnya x 100</p> <p>Jumlah siswa jenjang KB, TPA, SPS dan TK Usia 0 – 6 Tahun : Jumlah Penduduk Usia 0-6 tahun Di Kabupaten Kota x 100</p> <p>Jumlah Siswa Jenjang SMP/MTS di Sekolah : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun di kabupaten Kota x 100</p> <p>Jumlah Guru Yang Bersertifikasi jenjang TK/RA,SD/MI,SMP/MTS : Jumlah Guru Jenjang TK/RA,SD/MI,SMP/MTS x 100</p> <p>Jumlah Siswa putus Sekolah pada Tingkat dan jenjang sekolah: jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang sekolah pada tahun ajaran sebelumnya x 100</p>	Dinas Pendidikan
3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peningkatan dan pemahaman Nilai nilai budaya melayu	Dinas Pendidikan

5. DINAS KESEHATAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KLH	Jumlah kematian bayi sampai dengan 11 bulan pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup	Jumlah kematian bayi sampai dengan 11 bulan pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian balita sampai dengan 59 bulan pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup	Jumlah kematian balita sampai dengan 59 bulan pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian Neonatal sampai dengan 28 hari pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup	Jumlah kematian Neonatal sampai dengan 28 hari pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
4	Angka (AKI) Kematian Ibu per 100.000 KLH	Jumlah kematian ibu maternal pada satu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu maternal pada satu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh bayi lahir hidup pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada BALITA	Jumlah anak balita Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai	Jumlah anak balita Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak baita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1. Sangat pendek : Zscore <-3,0 2. Pendek : Zscore >= -3,0 s/d Zscore < -2,0</p>	<p>sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 : 1. Sangat pendek: Z score <-3,0 2. Pendek: Z score >= -3,0 s/d Z score < -2,0</p>	
6	<p>Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan</p>	<p>Jumlah masyarakat yg sudah memiliki jaminan kesehatan baik yg dibayarkan iurannya oleh pemerintah, pemberi kerja maupun mandiri bagi jumlah penduduk kali seratus</p>	<p>Jumlah masyarakat yg sudah memiliki jaminan kesehatan baik yg dibayarkan iurannya oleh pemerintah, pemberi kerja maupun mandiri bagi jumlah penduduk kali seratus</p>	Dinas Kesehatan
7	<p>Persentase Insiden kasus TB Paru</p>	<p>Angka seluruh kasus penyakit TB Paru (Baru dan Lama) yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu penduduk</p>	<p>Angka seluruh kasus penyakit TB Paru (Baru dan Lama) yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu penduduk</p>	Dinas Kesehatan
8	<p>Persentase kejadian kasus DBD</p>	<p>Angka seluruh kasus penyakit Demam Berdarah Dengue yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu</p>	<p>Angka seluruh kasus penyakit Demam Berdarah Dengue yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus ribu</p>	Dinas Kesehatan
9	<p>Angka Prevalensi Penyakit HIV/AIDS (Persentase)</p>	<p>Angka seluruh kasus penyakit HIV/AIDS (Baru dan Lama) yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus persen</p>	<p>Angka seluruh kasus penyakit HIV/AIDS (Baru dan Lama) yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seratus persen</p>	Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PEMANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk	Angka seluruh kasus penyakit Malaria (Baru dan Lama) yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu penduduk	Angka seluruh kasus penyakit Malaria (Baru dan Lama) yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu di bagi seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama dikali seribu penduduk	Dinas Kesehatan
11	Angka Prevalensi Penyakit Tekanan Darah Tinggi	Angka seluruh kasus penyakit tekanan darah tinggi yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi jumlah seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama di kali seribu penduduk	Angka seluruh kasus penyakit tekanan darah tinggi yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi jumlah seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama di kali seribu penduduk	Dinas Kesehatan
12	Angka Prevalensi Penyakit Kanker Serviks dan Payudara	Angka seluruh kasus penyakit kanker serviks dan payudara yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi jumlah seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama di kali seribu penduduk	Angka seluruh kasus penyakit kanker serviks dan payudara yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi jumlah seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama di kali seribu penduduk	Dinas Kesehatan
13	Angka Prevalensi Penyakit /Gangguan Jiwa	Angka seluruh kasus penyakit gangguan jiwa yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi jumlah seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama di kali seribu penduduk	Angka seluruh kasus penyakit gangguan jiwa yang ditemukan dan mendapatkan penanganan sesuai standar pada satu wilayah dalam waktu tertentu dibagi jumlah seluruh penduduk pada satu wilayah dalam waktu yang sama di kali seribu penduduk	Dinas Kesehatan

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio konektivitas Kabupaten	Jalan poros dan jembatan didefinisikan dengan ruas jalan yang terdapat di dalam SK status ruas jalan Kabupaten Bengkalis, yang berstatus sebagai Ruas Jalan Kabupaten.	Panjang jalan poros kabupaten Bengkalis dalam kondisi baik	Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan
2	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi layak	Bangunan gedung pemerintah kondisi layak didefinisikan dengan jumlah bangunan gedung pemerintah yang memenuhi empat aspek layak fungsi yaitu: aspek keselamatan gedung, aspek kesehatan bangunan gedung, aspek kenyamanan bangunan gedung, dan aspek kemudahan bangunan gedung.	Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi layak	Bidang Cipta Karya
3	Panjang Infrastruktur jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik	Jalan kondisi baik didefinisikan sebagai jalan/jembatan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan pada permukaan	Panjang jalan poros kabupaten Bengkalis dalam kondisi baik	Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan
4	Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik	Daerah Irigai dalam kondisi di defenisikan sebagai daerah irigasi yang fungsional dengan sistem irigasi yang baik	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	Bidang Sumber Daya Air
5	Persentase luas kawasan bebas banjir	Kawasan bebas banjir adalah kawasan dengan resiko banjir rendah	Luas Kawasan Banir resiko rendah	Bidang Sumber Daya Air
6	Persentase garis pantai rawan abrasi	Garis pantai rawan abrasi adalah daerah pesisir pantai yang terdampak abrasi akibat gelombang air laut	Panjang garis pantai rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur	Bidang Sumber Daya Air

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang terlindungi infrastruktur			
7	Jumlah Unit Air Baku dalam Kondisi Baik	Unit Air Baku didefinisikan sebagai unit sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku	Jumlah unit air baku dalam kondisi baik	Bidang Sumber Daya Air
8	Persentase RT akses air bersih	Akses air bersih didefinisikan sebagai pemanfaatan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga Kabupaten x100	Bidang Cipta Karya
9	Persentase SIPJAKI yang terlaksana	SIPJAKI dikelola bersama oleh pembina jasa konstruksi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. SIPJAKI diharapkan tugas-tugas pembinaan (pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi) dapat dilakukan lebih mudah, dan juga tercipta koordinasi lebih baik antara pembina dan masyarakat.	Jumlah standar pelayanan minimum Jumlah ketersediaan dari data x100	Bidang Jasa Konstruksi
10	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan tata ruang	Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan Ruang didefinisikan sebagai pemanfaatan ruang yang mendapatkan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang (KKPR)	Jumlah Rekomendasi KKPR yang dikeluarkan	Bidang Tata Ruang

7. DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

(1) INDIKATOR KINERJA UTAMA	(2)	(3)	(4)	(5) PENANGGUNG JAWAB UKURAN
1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Perbandingan jumlah penduduk pada satu wilayah yang telah memiliki sarana rumah ibadah	$\frac{\text{Jumlah Tempat Ibadah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
2	Rasio rumah layak huni	Perbandingan rumah layak huni yang telah terbangun dengan jumlah penduduk pada satu wilayah	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didefinisikan sebagai jumlah Kelurahan /Desa yang telah terpenuhi PSU	$\frac{\text{Jumlah Lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Lingkungan Perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100$	Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
4	Rasio permukiman layak huni	Luas permukiman pada satu wilayah yang telah terpenuhi kriteria persyaratan layak huni dibandingkan jumlah luas keseluruhan wilayah	$\frac{\text{Luas Permukiman Layak Huni}}{\text{Luas Wilayah Permukiman}} \times 100$	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Lingkungan permukiman kumuh didefinisikan sebagai luas wilayah yang akan ditangani melalui ketetapan kepurusan Bupati Bengkalis Nomor: 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani x100 Luas Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	Rehabilitasi rumah layak huni didefinisikan sebagai jumlah warga negara yang memperoleh rumah layak huni akibat terjadinya bencana	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5	<p>Persentase lingkungan permukiman kumuh</p> <p>Lingkungan permukiman kumuh didefinisikan sebagai luas wilayah yang akan ditangani melalui ketetapan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis</p>	<p>Luas Lingkungan Permukiman Kumuh x100</p> <p>Luas Wilayah Permukiman</p>	<p>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>
6	<p>Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan</p> <p>Permukiman kumuh didefinisikan sebagai luas wilayah yang telah tertangani di perkotaan/kelurahan melalui ketetapan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis</p>	<p>Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani x100</p> <p>Luas Permukiman Kumuh</p>	<p>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>
7	<p>Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni</p> <p>Rehabilitasi rumah layak huni didefinisikan sebagai jumlah warga negara yang memperoleh rumah layak huni akibat terjadinya bencana</p>	<p>Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n</p> <p>Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang Akan ditangani Pada Tahun n</p> <p>x100</p>	<p>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>

(1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
8	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui Mediasi	Sengketa terselesaikan pada kasus sengketa yang telah terdaftar berupa tanah yang dikuasai/dimiliki pemerintah daerah dengan pihak masyarakat/perusahaan	Jumlah sengketa yang diselesaikan x100 Jumlah kasus yang terdaftar $\frac{\text{Jumlah sengketa yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100$ Bidang Pertanian

8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Warga Negara yang mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	<p>Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Jumlah kasus kebakaran dalam penanganan WAK</p> <p>Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun yang sama</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Jumlah Layanan Pemadaman di Kabupaten/Kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau diberikan Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun yang sama</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>	Dinas Pemadam Kebakaran

9. DINAS SOSIAL

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (1)	(2)	DEFINISI OPERASIONAL (3)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN (4)	PENANGGUNG JAWAB UKURAN (5)
1	Persentase PPKS mandiri	PPKS mandiri adalah PPKS binaan Dinas Sosial yang digraduasi dari penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah dan/atau dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial karena telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS Mandiri (4)	Dinas Sosial
2	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Bantuan Sosial yang diterima PPKS merupakan Bantuan tunai atau Non Tunai yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bersumber dari program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Kota	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah seluruh PPKS}} \times 100\%$	Dinas Sosial
3	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial adalah masyarakat rentan mengalami ketidakfungsian sosial yang berada di luar panti	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah seluruh PPKS yang seharusnya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$	Dinas Sosial

10. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Dibagi Dengan Jumlah Pencari Kerja (AKI Yang Dikeluarkan) Dikalikan 100%	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah AKI Yang Dikeluarkan}} \times 100\%$					Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	Persentase Konflik Hubungan Industrial Yang Tertangani	Jumlah Konflik Hubungan Industrial Yang terselesaikan Dibagi Jumlah Konflik Hubungan Industrial Yang Dilaporkan Dikalikan 100%	$\frac{\text{Jumlah Konflik Yang Terselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik Yang Dilaporkan}} \times 100\%$					Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
3	Persentase Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap	Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap Dibagi Jumlah Seluruh Tenaga Kerja Yang Diserap Dikalikan 100%	$\frac{\text{Jumlah Naker Lokal Yang Terserap}}{\text{Jumlah Naker Yang Diserap}} \times 100\%$					Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan kemampuan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki-laki sama dengan nilai Perempuan	IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender. Perhitungan Indikator: IPG : $1/3 [X_{cde} (1) + X_{cde} (2) + Linc-Dist]$ Xcde (1) = Xcde untuk harapan hidup Xcde(2) = Xcde untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan	DPPPA
2	Tingkat Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak	Peningkatan nilai evaluasi Kota Layak Anak Dalam Tugas Fungsi Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah Point /Nilai dalam Hasil Evaluasi Indikator Kota Layak Anak	DPPPA

1.1. DIMAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	DEFINISI OPERASIONAL (3)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN (4)	PENANGGUNG JAWAB UKURAN (5)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender terjadi apabila nilai IPM laki-laki sama dengan nilai IPM Perempuan	IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender.	DPPPA
2	Tingkat Capaian Kabupaten / Kota Layak Anak	Peningkatan nilai evaluasi Kota Layak Anak Dalam Tugas Fungsi Gugus Tugas Kota Layak Anak	Perhitungan Indikator: IPG : $1/3 [X_{ede} (1) + X_{ede} (2) + Linc-Dist]$ $X_{ede} (1) = X_{ede}$ untuk harapan hidup $X_{ede}(2) = X_{ede}$ untuk pendidikan $Linc-dist = Indeks$ distribusi pendapatan	DPPPA

12. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk	Hasil penyebaran laju pertumbuhan penduduk dalam satu tahun	(Persentase Hasil laju pertumbuhan penduduk) dibagi (Jumlah Penduduk) dikali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Menurunnya angka Kelahiran (TFR)	Hasil kegiatan pengendalian angka kelahiran yang dilaksanakan hasil survei antar sensus (SUPAS)	(Persentase hasil jumlah Wanita (15-19) dibagi (Jumlah Kelahiran) dikali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Meningkatnya Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CFR)	Hasil kegiatan pengendalian kelahiran yang dilaksanakan.	(Persentase hasil Jumlah KB Aktif) dibagi (Jumlah Hasil PUS) dikali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Persentase Kesertaan KB baru	Hasil kegiatan masyarakat dalam mengikuti program KB	(Persentase Jumlah PUS yang tidak menggunakan Kontrasepsi) dibagi (Jumlah Akseptor KB) dikali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Jumlah Persentase (BKB, BKR, BKL dan UPPKA) aktif	Hasil kegiatan anggota kelompok Masyarakat yang dilaksanakan	(Persentase hasil jumlah anggota kelompok yang ber 100% dibagi (Jumlah hasil anggota kelompok) dikali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Meningkatnya Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL dan UPPKA) yang aktif	Hasil kegiatan Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	(Persentase Jumlah PIK- R/M) dibagi (Jumlah Kecamatan) dikali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK-R) aktif	Hasil Kegiatan Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	(Persentase Jumlah PIK- R/M) dibagi (Jumlah Kecamatan) dikali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

12. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
1	(1) (2) Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk	(3) Hasil penyebaran laju pertumbuhan penduduk dalam satu tahun	(4) (Persentase Hasil laju pertumbuhan penduduk) dibagi (Jumlah Penduduk) dikali 100%	(5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Menurunnya angka Kelahiran (TFR)	Hasil kegiatan pengendalian angka kelahiran yang dilaksanakan hasil survei antar sensus (SLUPAS)	(Persentase hasil jumlah Wanita (15-19) dibagi (Jumlah Kelahiran) dikali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Meningkatnya Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CFR) Meningkatnya Persentase Ketersediaan KB baru Jumlah Persentase BAKR, BKR, BKL dan UPPKA/ aktif	Hasil Kegiatan masyarakat dalam mengikuti program KB Hasil kegiatan anggota kelompok Masyarakat yang dilaksanakan	(Persentase Jumlah PUS yang tidak menggunakan Kontrasepsi) dibagi (Jumlah Akseptor KB) dikali 100% (Persentase hasil jumlah anggota kelompok yang ber KB) dibagi (Jumlah hasil anggota kelompok) dikali 100% (Persentase Jumlah PK- R/M) dibagi (Jumlah Kecamatan) dikali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Meningkatnya Persentase Kemitraan (BKTR, BKR, BKL dan UPPKA) yang aktif	Hasil Kegiatan Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa	(Persentase Jumlah PK- R/M) dibagi (Jumlah Kecamatan) dikali 100%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

13. DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Ketersediaan Pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras) untuk mencukupi Kebutuhan Penduduk Kabupaten Bengkalis (kg/kpt/thn)	$\frac{\text{jumlah produksi} + \text{pemasukan dari luar daerah}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$	Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan
2	Persentase Peningkatan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	Persentase Pengadaan Beras untuk memenuhi Jumlah minuman Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	$\frac{\text{jumlah pengadaan cadangan pangan}}{\text{jumlah Minimum Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten}} \times 100$	Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan
3	Skor Pola Pangan Harapan	Pengukuran untuk menilai mutu gizi dan keberagaman konsumsi pangan rata-rata masyarakat dengan skor tertinggi 100	Hasil perhitungan survey dari total keberagaman konsumsi rata-rata masyarakat	Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis

14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
1	Indeks Kualitas Air	(3) Merupakan hasil dari penjumlahan nilai status mutu air pada sungai utama/danau/waduk/situ dengan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Nilai dari setiap parameter dinormalisasi ke dalam skala indeks dengan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.	(4) $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2}{rata-rata} + \frac{(C_i/L_{ij})^2}{maksimum}}$ Keterangan : IPj : Indeks pencemaran bagi peruntukan (I) Ci : konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij : baku mutu parameter peruntukan air (I)	Dinas Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Udara	Merupakan hasil rerata IEU SO2 dan IEU NO2 yang selanjutnya dikoreksi melalui persamaan Indeks Kualitas Udara Parameter NO2 dan SO2 diukur pada 4 lokasi (yang mewakili area transportasi, industri, perumahan dan komersial atau perkantoran) dengan metode passive sampler. Perhitungan indeksnya dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives.	(5) $IKD = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1) \right)$ Keterangan : IKD : Indeks kualitas udara PU : Indeks pencemaran udara	Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Merupakan perbandingan jumlah luas tutupan lahan dengan luas wilayah administrasi kabupaten/kota, luasan tutupan lahan suatu wilayah dihitung dari penjumlahan data luas tutupan hutan dan luas tutupan vegetasi yang meliputi luas tutupan belukar dan belukar rawa, serta luas ruang terbuka hijau.	(6) $IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \right) \times \frac{50}{54,3}$ Dimana $TL = (LTH + (LTH + LRTH) \times 0,6) : LW$	Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1) 4	(2) Perteslase sampah yang dikelola	(3) Membandingkan sampah keseluruhan dengan sampah yang penanganan pengurangan sampah di sumber	(4) $\frac{\text{Potensi timbulan sampah Kabupaten}}{\text{Volume timbulan sampah yang dikelola}} \times 100\%$	(5) Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Persentase sampah yang dikelola	Membandingkan potensi sampah keseluruhan dengan yang dikelola di seluruh kabupaten/kota yang dikelola di TPA dan pengurangan sampah di sumber timbulan secara menyeluruh melalui	$\frac{\text{Potensi timbulan sampah Kabupaten}}{\text{Volume timbulan sampah yang dikelola}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-el.	Jumlah penduduk usia 17 tahun atau telah menikah atau pernah menikah yang sudah memiliki KTP-el dibagi jumlah wajib KTP-el dikali 100%.	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia } \geq 17 \text{ tahun atau telah menikah/ pernah menikah}}{\text{Jumlah Penduduk yang menikah/ pernah menikah}} \times 100$	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis
2	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki kartu KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari dikali 100%.	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah Keseluruhan Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 hari}} \times 100$	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis
3	Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 Tahun	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran di bagi jumlah keseluruhan anak usia 0-18 tahun dikali 100%.	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Keseluruhan anak usia 0-18 tahun.}} \times 100$	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis
4	Persentase Pasangan Suami Istri Yang memiliki Akta Perkawinan	Jumlah pasangan kawin selain beragama islam yang telah memiliki Akta Perkawinan/Nikah dibagi dengan jumlah pasangan kawin selain beragama islam dikali 100%.	$\frac{\text{Jumlah pasangan kawin selain beragama islam yang memiliki Akta Perkawinan/Nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan kawin}} \times 100$	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis
5	Cangkupan Kepemilikan Akta Kematian.	Jumlah penduduk yang meninggal (mati) yang telah diterbitkan akta kematian dibagi dengan jumlah penduduk yang meninggal (mati) dikali 100%	$\frac{\text{Jumlah penduduk meninggal (mati) yang memiliki Akte Kematian}}{\text{Jumlah Penduduk yang meninggal (mati).}} \times 100$	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

NO KINERJA UTAMA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Persenase Cakupan Pencatatan Perceraian. Akta	Jumlah pasangan suami istri yang beragama selain islam yang bercerai yang memiliki akte perceraian dibagi dengan jumlah pasangan suami istri selain beragama islam yang memiliki akta Perkawinan/Nikah yang bercerai dikali 100%	Jumlah penduduk selain beragama islam yang bercerai yang memiliki akta perceraian $\frac{\text{Jumlah pasangan suami istri selain beragama islam yang memiliki akta perkawinan yang bercerai}}{\text{Jumlah penduduk selain beragama islam yang bercerai yang memiliki akta perceraian}} \times 100$	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis

16. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	Desa mandiri mencerminkan kemajuan masyarakat yang kuat untuk maju, juga dapat menghasilkan produk unggulan desa/karya desa yang membanggakan serta kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhannya.	Dihitung berdasarkan jumlah desa mandiri yang ada	DINAS PMD
2	Kontribusi PADes terhadap APBDes	Pendapatan asli desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainnya yang dilakukan sebuah desa	Dihitung berdasarkan jumlah desa yang mendapatkan PADes di bagi seluruh desa di kali 100%	DINAS PMD
3	Jumlah BUMDesa Aktif	BUMDesa yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal desa tersebut, yang dikelola oleh pelaksana oprasional.	Dihitung berdasarkan jumlah BUMDesa Aktif yang memperoleh laba keuntungan setiap bumdesa	DINAS PMD
4	Persentase PKK Aktif	TP PKK Desa/Kecamatan/Kabupaten yg aktif dalam menjalankan 10 program pokok pkk guna mendukung program-program pemerintah	Dihitung berdasarkan jumlah PKK Aktif yang ada dibagi jumlah seluruh lembaga PKK yang ada dikali 100%	DINAS PMD

17. DINAS PERHUBUNGAN

(1) NO INDIKATOR KINERJA UTAMA	(2) DEFINISI OPERASIONAL	(3) PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	(4) PENANGGUNG JAWAB UKURAN
1	Jumlah Pelayaran Uji Berkala Kendaraan/ Umum	Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang dimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	Dinas Perhubungan
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan penyeberangan a. Orang b. Barang (Ton)	Jumlah orang yang terangkut angkutan penyeberangan b. Jumlah barang yang terangkut angkutan penyeberangan	Dinas Perhubungan
3	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi layak operasi	Jumlah Pelabuhan yang Laik Operasi Dibagi Dengan Jumlah Pelabuhan yang ada Dikalikan 100 Persen	Dinas Perhubungan

18. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkulu	Indeks penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE Kabupaten Bengkulu, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<p style="text-align: center;">INDEKS SPBE = $\frac{\sum ND \times BD}{BD}$</p> <p style="text-align: center;">Keterangan: ND = Nilai Indeks Domain BD = Bobot Domain</p>	Bidang Pengelolaan Berbasis Elektronik
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkulu	Indeks pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Yang di keluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi	Hasil pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik KIP Provinsi Riau	- Bidang Sumberdaya Komunikasi dan Informasi - Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
3	Meningkatnya pengcioiaan satu data Kabupaten Bengkulu	Persentase jumlah data sektoral yang disampaikan oleh perangkat daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menyampaikan data sektoral}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100$	Bidang Statistik dan Persandian
4	Mengamankan pengamanan informasi pemerintah melalui penyelenggaraan persandian	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktifitas komunikasi dan informasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam aktifitas komunikasi dan informasi perangkat daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100$	Bidang Statistik dan Persandian

19. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat tahun n - tahun (n-1) bagi jumlah koperasi aktif kali 100%	Jumlah koperasi sehat / Jumlah koperasi aktif x 100%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2	Jumlah Produk Unggulan Produkksi Non Industri (%)	Jumlah produk tempatan unggulan tahun n - tahun (n-1) bagi jumlah usaha mikro kecil kali 100%	Jumlah produk tempatan unggulan / Jumlah usaha mikro kecil x 100%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
1	(1) Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	(2) Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	(3) Nilai Realisasi Investasi PMA + Nilai Realisasi Investasi PMDN	(4) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	(1) Indeks Kepuasan Masyarakat	(2) Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	(3) $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Pengisi Per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	(4) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

21. DINAS PARWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah orang baik laki-laki dan perempuan untuk mancanegara yang berkunjung ke daerah dalam satu tahun	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang)	Bidang Pariwisata
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah orang baik laki-laki dan perempuan untuk nusantara yang berkunjung ke daerah dalam satu tahun	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)	Bidang Pariwisata
3	Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan agar tetap ada dan terjaga	Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Bidang Kebudayaan
4	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan dalam satu tahun	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam satu tahun	Bidang Kebudayaan
5	Jumlah Pemuda yang Berprestasi atau Pelopor	Jumlah pemuda yang dibina yang akan diseleksi untuk tingkat Provinsi dan dikirim ke tingkat Nasional untuk utusan daerah Kabupaten Bengkalis	Jumlah pemuda yang dibina oleh Disparbudpora Kabupaten Bengkalis yang akan diseleksi untuk tingkat Provinsi dan dikirim ke tingkat Nasional	Bidang Kepemudaan
6	Persentase Wirausaha Pemuda	Jumlah wirausaha muda se-kabupaten Bengkalis dibagi Jumlah seluruh wirausaha se-kabupaten Bengkalis dikalikan 100%	Jumlah wirausaha muda se-kabupaten Jumlah seluruh wirausaha se-kabupaten X 100%	Bidang Kepemudaan
7	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi dibagi Jumlah pemuda se-kabupaten Bengkalis dikalikan 100%	Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi Jumlah pemuda se-kabupaten X 100%	Bidang Kepemudaan
8	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan tingkat daerah dan provinsi	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan	Bidang Olahraga

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Jumlah Atlet Berprestasi	Jumlah atlet yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah dan provinsi (POPDA + PEPARPEDA + Kejuaraan lainnya minimal tingkat kecamatan) dalam satu tahun yang membawa nama daerah dan provinsi	Jumlah atlet yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah dan provinsi (POPDA + PEPARPEDA + Kejuaraan lainnya minimal tingkat kecamatan) dalam satu tahun	Bidang Olahraga

22. DINAS PERIKANAN

NO (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	DEFINISI OPERASIONAL (3)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN (4)	PENANGGUNG JAWAB UKURAN (5)
1	Jumlah Produksi Perikanan	Hasil produksi dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam satuan ton	$\text{Jumlah produksi perikanan} = \text{Jumlah Perikanan tangkap} + \text{Jumlah Produksi Perikanan Budidaya}$	Bidang Pelayanan Usaha Perikanan dan Bidang Perikanan Budidaya
2	Pendapatan rata-rata nelayan	Pendapatan rata-rata yang diterima nelayan dalam satu tahun	$\text{Pendapatan rata-rata nelayan (Rp)} = \frac{\text{Jumlah pendapatan nelayan sampel}}{\text{Jumlah alat tangkap nelayan sampel}}$	Dinas Perikanan

23. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Produksi Tanaman Pangan (Padi)	Produksi hasil padi yang dihitung keseluruhan dari hasil panen dalam 1 tahun musim tanam	Jumlah Produksi padi dalam satu tahun (Ton)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu
2	Produksi Tanaman Hortikultura	Produksi hasil dari beberapa jenis komoditi hortikultura (sayuran dan buah-buahan) yang dihitung keseluruhan dari hasil panen dalam 1 tahun	Jumlah Produksi tanaman hortikultura dalam satu tahun (Ton)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu
3	Populasi Sapi Ternak	Produksi hasil ternak Sapi yang dihitung keseluruhan populasi ternak dari hasil pertambahan populasi dalam 1 tahun.	Jumlah ternak sapi dalam satu tahun (ekor)	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu

24. DINAS PERKEBUNAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Produksi taruman perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Sagu)	Produksi tanaman perkebunan unggulan (karet, kelapa, kelapa sawit dan sagu) dalam 1 satu tahun	Jumlah produksi tanaman perkebunan dalam 1 tahun (Ton)	Dinas Perkebunan
2	Produktivitas tanaman perkebunan (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Sagu)	Produksi tanaman perkebunan unggulan (karet, kelapa, kelapa sawit dan sagu) dalam 1 satu tahun per luas Tanaman Menghasilkan	Jumlah produksi tanaman perkebunan dalam 1 tahun dibagi luas Tanaman Menghasilkan (Ton/Ha)	Dinas Perkebunan
3	Persentase petani dengan penghasilan minimal setara UMR	Hasil jual produksi masing-masing komoditas tanaman perkebunan dibagi jumlah petani pekebun dari masing-masing komoditas dibandingkan dengan UMR	Jumlah produksi dikali harga jual dibagi jumlah petani pekebun	Dinas Perkebunan
			Petani pekebun dari komoditas yang hasil jualnya lebih besar atau sama dengan UMR dibagi dengan jumlah pekebun total	Dinas Perkebunan

25. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Penting bagi Masyarakat	Nilai yang didapat dalam pengukuran terhadap ketersediaan bahan pokok penting yang tersedia di Pasar Pemerintah Kabupaten Bengkulu	Jumlah bahan pokok penting x 100% Pasar Pemerintah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Persentase Alat - alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perengkapannya (LUTIP) bertanda sah yang berlaku	Persentase yang didapat sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dengan melakukan pengukuran terhadap alat ukur, takar dan timbangan yang ada di Kabupaten Bengkulu	Jumlah alat ukur yang ditera x 100% Target RPJMD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Persentase Pelaku Usaha IKM yang di Fasilitas Izin Produksinya	Fasilitas segala kelengkapan izin Produk bagi pelaku usaha IKM yang belum mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah IKM yang difasilitasi x 100% Jumlah IKM Binaan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan IKM Kabupaten Bengkulu pertahun dalam bentuk pengembangan Sentra-Sentra Industri yang ada di Kabupaten Bengkulu	Jumlah Sentra IKM x 100% Target RPJMD	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

26. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan Literasi Masyarakat	Untuk melihat jumlah masyarakat yang mengikuti event dalam rangka meningkatkan minat baca	Jumlah Peserta mengikuti event kebudayaan gemar membaca pada tahun berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah perpustakaan berbasis IT	Perpustakaan online lebih mudah diakses dan diminati karena tidak terikat tempat dan waktu	Jumlah perpustakaan berbasis IT pada tahun berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan	Untuk memantau jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan setahun	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pada tahun berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Untuk memantau upaya peningkatan minat baca masyarakat melalui tersedianya perpustakaan-perpustakaan persatuan penduduk	Rasio antara jumlah perpustakaan kelurahan/desa, dan perpustakaan sekolah dengan jumlah penduduk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Jumlah koleksi perpustakaan yang tersedia dalam satu tahun	Untuk memantau penambahan jumlah koleksi perpustakaan dalam satu tahun	Jumlah koleksi perpustakaan pada tahun berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Untuk melihat jumlah perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	Persentase Arsip berbasis elektronik	Untuk memantau jumlah arsip yang telah diahimmediakan secara elektronik	$\frac{\text{Jumlah arsip yang dikelola secara elektronik}}{\text{Jumlah arsip}} \times 100$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

27. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Banyaknya Perda dan Perkada yang ditegakkan dibagi dengan banyaknya Perda dan Perkada yang belum ditegakkan kemudian dikalikan dengan 100%	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang belum ditegakkan}} \times 100\%$	Bidang Tranribum dan PPD
2	Persentase Gangguan Tranribum yang dapat diselesaikan	Banyaknya Gangguan Tranribum yang telah diselesaikan dibagi dengan banyaknya Gangguan Tranribum yang belum diselesaikan kemudian dikalikan dengan 100%	$\frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang belum ditegakkan}} \times 100\%$	Bidang Linmas dan PPD Bidang Siaga

28. RABIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	DEFINISI OPERASIONAL (3)	PENJELASAN/FORMULASI PEKERJAAN (4)	PENANGGUNG JAWAB UKURAN (5)																																	
1	Persentase pelaksanaan RKPD terhadap RPJMD	Ukuran kesesuaian antara jumlah program RKPD terhadap jumlah program RPJMD pada tahun berkenaan	Jumlah program RKPD X 100 Jumlah program RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																																	
2	Persentase kesesuaian prioritas nasional dengan daerah	Ukuran kesesuaian antara jumlah prioritas daerah pada tahun berkenaan	Jumlah prioritas daerah X 100 Jumlah prioritas nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																																	
3	Indeks profesional SDM perencanaan	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Kategori Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 dimensi: Kualifikasi (tingkat pendidikan terakhir); Kompetensi (pengembangan kompetensi meliputi Diklat Kepemimpinan, Fungsional, Teknis dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/ Setara); Kinerja (penilaian prestasi kerja ASN: SKP dan Perilaku Kerja); dan Disiplin (Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat). Sangat Tinggi : Nilai 91 - 100 Tinggi : Nilai 81 - 90 Sedang : Nilai 71 - 80 Rendah : Nilai 61 - 70 Sangat Rendah : Nilai 0 - 60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah																																	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat terhadap laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Pengukuran akuntabilitas kinerja meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja dengan kategori penilaian sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="478 985 606 1388"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>Sangat Perburukan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>C</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>D</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>E</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>F</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>G</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>H</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>I</td> <td>Sangat Buruk</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori Nilai Angka	Interpretasi	1	AA	Sangat Perburukan	2	A	Sangat Buruk	3	B	Sangat Buruk	4	C	Sangat Buruk	5	D	Sangat Buruk	6	E	Sangat Buruk	7	F	Sangat Buruk	8	G	Sangat Buruk	9	H	Sangat Buruk	10	I	Sangat Buruk	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
No	Kategori Nilai Angka	Interpretasi																																			
1	AA	Sangat Perburukan																																			
2	A	Sangat Buruk																																			
3	B	Sangat Buruk																																			
4	C	Sangat Buruk																																			
5	D	Sangat Buruk																																			
6	E	Sangat Buruk																																			
7	F	Sangat Buruk																																			
8	G	Sangat Buruk																																			
9	H	Sangat Buruk																																			
10	I	Sangat Buruk																																			

29. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur	Jumlah aset yang telah di tata usaha secara tertib dan terukur	$\left(\frac{\text{Jumlah Aset yang tertib dan Terukur}}{\text{Total Keseluruhan Aset}} \right) \times 100\%$	Kepala Bidang Aset
3	Persentase Pemenuhan Kekayaan Aset Daerah yang Menunjang Peningkatan PAD	Jumlah aset pemerintah kabupaten Bengkulu yang telah menunjang peningkatan PAD	$\left(\frac{\text{Jumlah Aset yang Menunjang Peningkatan PAD}}{\text{Total Keseluruhan Aset}} \right) \times 100\%$	Kepala Bidang Aset
	Ketepatan waktu penyusunan APBD	Ketepatan waktu penyelesaian setiap tahapan penyusunan APBD sesuai peraturan yang berlaku	Tanggal penyampaian RAPBD - Tanggal penandatanganan persetujuan bersama KDH dan DPRD	Kepala Bidang Anggaran
	Persentase bendahara pengeluaran yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban	Jumlah bendahara pengeluaran yang menyampaikan pertanggungjawaban tepat waktu	$\left(\frac{\text{Jumlah Bendahara Pengeluaran yang Tepat Waktu dalam Penyampaian Pertanggungjawaban}}{\text{Bendahara Pengeluaran}} \right) \times 100\%$	Kepala Bidang Perbendaharaan
	Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyelesaian LKPD tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tanggal Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Tanggal ttd Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kepala Bidang Akuntansi

30. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ratio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat dan Daerah, DAU, DAK, Dana Desa.	$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

31. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio PNS Berpendidikan Tinggi (PT)	Merupakan penjabaran terhadap Pendidikan PNS S1 sampai S3 dari keseluruhan PNS Kabupaten Bengkalis	$\frac{\text{Jumlah PNS berpendidikan PT (S1, S2 dan S3) tahun ini} - \text{Jumlah PNS berpendidikan PT (S1, S2 dan S3) tahun lalu}}{\text{Jumlah PNS berpendidikan PT (S1, S2 dan S3) tahun ini}} \times 100$	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Informasi
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Merupakan Penjabaran terhadap Jumlah Jabatan Fungsional yang bersertifikat di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap jumlah keseluruhan Pejabat Fungsional di luar Guru dan Tenaga Kesehatan yang ada di Kabupaten Bengkalis	$\frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Bersertifikat tahun ini} - \text{Jumlah Jabatan Fungsional Bersertifikat tahun lalu}}{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Bersertifikat tahun ini}} \times 100$	Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Informasi
3	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepegawaian	Merupakan perhitungan terhadap kinerja pelayanan administrasi kepegawaian yang dilakukan oleh BKPP terhadap Masyarakat khususnya ASN Kabupaten Bengkalis yang dihitung berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Seluruh Bidang dan Sekretariat BKPP
4	Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	Merupakan persentase terhadap penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS baik pelanggaran disiplin ringan, sedang maupun pelanggaran berat, khususnya PNS Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari menunjang kegiatan seperti pengawasan	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang terjadi}} \times 100$	Bidang Penilaian Kinerja, Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan pembinaan serta penghargaan.	Jumlah Pelanggaran Disiplin	

32. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	Hasil kegiatan kelibangan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu	$\frac{\text{Jumlah Kelibangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kelibangan dalam Renja Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Badan Penelitian Dan Pengembangan
2	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Inovasi Perangkat Daerah dalam Satu Tahun	$\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$	Badan Penelitian Dan Pengembangan

NO KETERANGAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Peningkatan Kesiapsiagaan Mitigasi Kebencanaan	Warga Negara yang mendapatkan Layanan Sosialisasi, Edukasi, Informasi dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penyelenggaraan Mitigasi Kebencanaan	Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan Sosialisasi, Edukasi, Informasi dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan <u>Jumlah Warga Negara</u> <u>diterima</u> <u>Pasar Bencana</u>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
2 Peningkatan Cepat Kesiapsiagaan Lama Pasar (KLB) Bencana	Peningkatan (%) Kecepatan Respon Kurang dari 24 Jam untuk Setiap Status KLB Bencana dan Darurat Bencana	<u>Jumlah tanggapan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penanggap KLB</u> <u>Bencana dan Darurat Bencana</u> <u>Jumlah Status Respon KLB Bencana dan Darurat Bencana</u>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bidang Kedaruratan)
3 Peningkatan pemerintah Rehabilitasi Pasar Berbasis Struktur Pasar Bencana Bencana Kebutuhan Kebutuhan Bencana	Kawijakan 1 kriteria Pasar yang memperoleh Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Bencana	<u>Jumlah Pasar yang memperoleh</u> <u>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Bencana</u> <u>Jumlah Pasar yang Terdampak Pasar Bencana</u>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

34. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat sasaran (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, PKK dan tokoh pemuda) yang mendapatkan pembinaan	Jumlah masyarakat sasaran yang mendapatkan pembinaan pada tahun ke - n	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase partisipasi politik masyarakat	Jumlah masyarakat yang terdaftar datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada proses pemilu	$\frac{\text{Jumlah masyarakat datang ke TPS yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah Pemilih Terdaftar}} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

35. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
1	(1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(2) Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	(3) 	(4) Direktur RSUD Bengkalis
2	(2) Status Akreditasi Rumah Sakit	(3) Status akreditasi rumah sakit adalah penghargaan yang diterima rumah sakit dari lembaga independen penyelenggara akreditasi berdasarkan keputusan akreditasi terhadap capaian standar nasional akreditasi rumah sakit dengan tingkatan pertama (bintang 1), dasar (bintang 2), madya (bintang 3), utama (bintang 4) dan paripurna (bintang 5).	(4) Status akreditasi rumah sakit	(5) Direktur RSUD Bengkalis
3	(3) Cost Recovery Rate	(4) Nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan rumah sakit menutup biaya operasionalnya.	(5) $\frac{\text{Total Revenue (TR) / Total Pendapatan}}{\text{Total Cost (TC) / Total Pengeluaran}} \times 100\%$	(6) Direktur RSUD Bengkalis

36. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai yang didapat dari hasil pengukuran kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh RSUD Mandau.	$\frac{\text{Total dari hasil survey kepuasan masyarakat}}{\text{Total wisnu yang terdidi}} \times 100\%$	Direktur RSUD Mandau
2	Status Akreditasi Rumah Sakit	Status akreditasi rumah sakit adalah penghargaan yang diterima rumah sakit dari lembaga independen penyelenggara akreditasi berdasarkan keputusan akreditasi terhadap capaian standar nasional akreditasi rumah sakit dengan tingkatan perdana (bintang 1), dasar (bintang 2), madya (bintang 3), utama (bintang 4) dan paripurna (bintang 5).	Status akreditasi rumah sakit	Direktur RSUD Mandau
3	Cost Recovery Rate	Nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pendapatan rumah sakit menutup biaya operasionalnya.	$\frac{\text{Total Revenue (TR) / Total Pendapatan}}{\text{Total Cost (TC) / Total Pengeluaran}} \times 100\%$	Direktur RSUD Mandau

37. KECAMATAN BENGKALIS

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya		$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsut} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Camat		

38. KECAMATAN BANTAN

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Perunsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai Perbandingan}}{\text{Perbandingan}}$	Camat

38. KECAMATAN BANTAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Perunsur} \times \text{Nilai Perbandingan}}{\text{Total unsur yang teruji}}$	Camat

39. KECAMATAAN BUKIT BATU

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor} \times \text{Nilai Penting}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Camat

40. KECAMATAN SIAG KECIL

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Perunsur} \times \text{Nilai Perimbangan}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Camat

42. KECAMATAN RUPAT UTARA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur} \times \text{Nilai Pembang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Camat

43. KECAMATAN MANDAU

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Perscpsi Per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang torasi}}$	Carnat

44. KECAMATAN PINGGIR

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Perumahaan} \times \text{Nilai Perbandingan}}{\text{Total unsur yang terdapat}}$	Camat

45. KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Terjadi Terukur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang Terisi}}$	Camat

46. KECAMATAN TALANG MUANDAU

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per unsur} \times \text{Nilai}}{\text{Total unsur yang terisi} \times \text{Perimbang}}$	Camat

47. RECAMATAN BATHIN SOLAPAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB UKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatour penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Perunsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Camat

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI